



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015**

Skripsi

Oleh

Tiffany Clara

2013330094

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015**

Skripsi

Oleh

Tiffany Clara

2013330094

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Tiffany Clara  
Nomor Pokok : 2013330094  
Judul : Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 13 Januari 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A

**Sekretaris**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

**Anggota**

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tifanny Clara  
NPM : 2013330094  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Januari 2017



Tifanny Clara

## ABSTRAK

Nama : Tiffany Clara  
NPM : 2013330094  
Judul : Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015

---

Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Indonesia akan menghadapi liberalisasi pasar salah satunya di bidang profesi insinyur. Indonesia akan menghadapi permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi Indonesia adalah jumlah insinyur di Indonesia yang tidak memadai untuk mengisi profesi insinyur pada pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi yang tercantum didalam RPJMN 2014-2019. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi Indonesia adalah terdapat peraturan yang tercantum didalam MRA *on Engineering* yang mengharuskan insinyur memperoleh gelar ACPE untuk dapat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya Indonesia memang sebagai negara yang memiliki jumlah ACPE terbanyak namun jika dengan dibandingkan dengan jumlah per satu juta penduduk, jumlah ACPE di Indonesia tidak profesional dan kalah dibandingkan negara – negara anggota ASEAN lainnya. Maka dari itu penelitian ini mengambil pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempersiapkan Profesi Insinyur dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?”.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, yang pertama adalah pluralisme. Yang kedua liberalisme instutional. Yang ketiga, tahapan integrasi ekonomi.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Upaya pertama yaitu dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 mengenai jasa keinsinyuran dan Undang – undang No. 35 Tahun 2016 mengenai program profesi insinyur. Terdapat 40 universitas yang ditunjuk salah satunya seperti ITB dan UNPAR untuk menyelenggarakan Profesi Program Insinyur. Yang kedua, pemerintah Indonesia menetapkan lembaga sertifikasi nasional seperti BNSP dan LPJK. BNSP dan LPJK ditunjuk untuk melakukan sertifikasi bagi insinyur di Indonesia. LPJK bekerjasama dengan asosiasi profesional yaitu PII untuk melakukan sertifikasi.

**Kata Kunci :** MEA, MRA, Sertifikasi, Insinyur, Program Profesi Insinyur.

## ABSTRACT

Name : Tiffany Clara  
Student Number : 2013330094  
Title : The Engineering Profession in Indonesia and MEA  
2015

---

In the era of the ASEAN Economic Community in 2015, Indonesia will face market liberalization, one of them is in the field of engineering profession. Indonesia will face internal and external barriers. Internal problems faced by Indonesia is the number of engineers in Indonesia which are not sufficient to fill the profession of engineer on the construction of infrastructure in Jokowi's government, stated in RPJMN 2014-2019. While the external problem is the rules contained in MRA on Engineering, which requires engineers to earn ACPE degree to be able to enter the ASEAN Economic Community. Compared with other ASEAN member countries, Indonesia is a country that has the largest number of ACPE, but with the comparison per one million population, the number of ACPE in Indonesia are classified unprofessional and more poor than the other ASEAN member countries. Therefore the research question is "How does The Indonesian Government prepare engineer profession to face the era of The ASEAN Economic Community in 2015?".

To answer the research question, writer uses several theories and concepts. The first one is pluralism. The second one is Liberalism Institutional. The third one is the stage of economic integration concept.

This research found that there are efforts made by the government which the Government of Indonesia issued "Undang-Undang No. 11 Tahun 2014" regarding the engineering services and "Undang-Undang No. 35 Tahun 2016" regarding the engineering profession program. There are 40 universities chosen by the government to organize Engineer Profession Program, which one of them are ITB and UNPAR. Secondly, The Government of Indonesia also set a national certification agency such as BNSP and LPJK. BNSP and LPJK are appointed to conduct certification for engineers in Indonesia. LPJK cooperating with professional associations called PII to conduct certifications.

***Keywords : ASEAN Economic Community, MRA, Certification , Engineer, Engineer Profession Program***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahNya, saya dimampukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini berjudul “Profesi Insinyur di Indonesia dan MEA 2015”.

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 negara – negara anggota ASEAN seperti Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi liberalisasi pasar di bidang profesi insinyur. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dari mata kuliah skripsi dalam program Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pembaca yang menekuni bidang ilmu hubungan internasional.

Bandung, 17 Januari 2017

Tiffany Clara

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Untuk *my one and only God*, Tuhan Yesus Kristus. *Its only by your grace ☺*
2. Untuk Papi, Mami, Cici Evelyn, dan alyn. Terimakasih buat dukungannya dan kepercayaannya kalau aku bisa selesain skripsi ini, *I finally did it!*  
*You are my favorite support system.* Inget banget pas telpon papi karna udah *hopeless*, papi cuma bilang tenang aja kerjain aja *do your best and let god do the rest*, karna pertolongan dede datengnya dari Tuhan Yesus. *It really works, My dad knows how to support me, Thank u my lovely dad. U always be my fav person in the world <3*
3. Untuk semua dosen Hubungan Internasional Katolik Parahyangan maupun dosen MKU terimakasih sudah mengajari saya banyak hal. Terutama untuk dosen pembimbing saya yaitu bang tian, bang terimakasih sudah mau membimbing saya dan untuk teman – teman HI 2013.
4. Untuk *My lovely* Bidadari Unpar, Marilyn Chandra, Zefanya Claudia, Claudia Adistis, Sarah Lucia, Meylina Sarah, Kania Anjani, Dessyta Octavera, Egyta Tania, dan Fabiola Widi. Gengs *I LOVE U SO MUCH!!!*  
“Bandung bagiku bukan hanya sebatas geografis, namun lebih daripada itu Bandung melibatkan perasaan”
5. Untuk AOG UNPAR, UNPAR 1, dan AOG 23. Vina Pradisa, Vanessa, dapot, cherry, gaby, ci mili dan semuanya. *Thankyou so much geng, i love u so much.*



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR AKRONIM .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	6
1.2.2 Perumusan Masalah .....	11
1.2.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Kajian Literatur .....	14
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.6.1 Metode Penelitian .....	22
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.7 Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II .....	24
MRA di bidang Profesi Keinsinyuran .....	24
2.1 Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN .....	25
2.2 Empat Karakteristik didalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 .....	27
2.2.1 Pasar Bebas dan Basis Produksi .....	27
2.2.2 Kawasan Ekonomi yang Kompetitif .....	30
2.2.3 Pembangunan Ekonomi yang Setara .....	32
2.2.4 Integrasi ke dalam Ekonomi Global .....	33
2.3 Mutual Recognition Arrangement .....	34
2.3.1 MRA di Bidang Jasa Keinsinyuran .....	36
2.3.2 Kualifikasi untuk Menjadi Insinyur Profesional .....	41
2.3.3 Pengaturan Praktek Insinyur Asing .....	42
2.4 Undang – Undang Sekto Jasa Konstruksi yang Berhubungan dengan Profesi Keinsinyuran .....	43
2.5 Profile Lembaga Sertifikasi Nasional Indonesia di Bidang Jasa Keinsinyuran .....	47
2.5.1 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi .....	48
2.5.2 Badan Sertifikasi Nasional Profesi .....	49
2.5.3 Persatuan Insinyur Indonesia .....	51
2.5.3.1 Sertifikasi Insinyur ASEAN .....	52

2.5.3.2 Sertifikasi ACPE .....	54
2.5.3.3 Sertifikasi APEC-ER .....	55
BAB III .....	57
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi MEA di bidang Insinyur	57
3.1 Insinyur di Indonesia .....	58
3.1.1 Peluang Insinyur di Pemerintahan Jokowi dalam RPJMN 2014 - 2019 .....	61
3.1.2 Jumlah Total Insinyur dan Insinyur Profesional di Indonesia dan Negara - Negara Anggota ASEAN .....	62
3.1.3 ACPE di Indonesia dan Negara – Negara Anggota ASEAN .....	64
3.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempersiapkan Tenaga Insinyur .	66
3.2.1 Undang – Undang Keinsinyuran No. 11 tahun 2014 .....	66
3.2.2 Program Profesi Insinyur .....	76
3.2.2.1 Universitas Katholik Parahyangan .....	83
3.2.2.2 Institut Teknologi Bandung .....	87
3.2.3 Lembaga Pemberi Sertifikat Keinsinyuran .....	89
3.2.3.1 LPJK .....	89
3.2.3.2 BNSP .....	93
3.2.3.3 PII .....	94
3.2.3.3.1 PPPI .....	101
3.2.3.3.2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan .....	102
BAB IV .....	104
KESIMPULAN .....	104
LAMPIRAN .....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	115

## **Daftar Grafik**

Grafik 3.1 Perbandingan Kualitas SDM Insinyur ASEAN dan Asia

Grafik 3.2 Total ACPE di Indonesia dari Tahun 2009 - 2016

## **Daftar Tabel**

2.1 Tabel Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

3.1 Tabel 40 Universitas di Indonesia yang ditunjuk untuk menyelenggarakan  
Program Profesi Insinyur

## DAFTAR AKRONIM

ACIA: ASEAN Comprehensive Investment Agreement  
ACCP : ASEAN Committee on Consumer Protection  
ACPE : ASEAN Chartered Professional Engineer  
ACPECC : ASEAN Professional Engineer Coordinating Committee  
APEC – ER :Asia – Pacific Economic Cooperation Engineers Register  
AEM : ASEAN Economic Ministers  
AEGC : ASEAN Expert Group on Competition  
AER : ASEAN Engineering Registered  
AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services  
AFEED : Equitable Economic Development  
AFEO : ASEAN Federation Of Engineering  
AFIF : ASEAN Financial Integration Framework  
AFTA : ASEAN Free Trade Area  
AIPR : ASEAN Intellectual Property Right  
AMS : ASEAN Member States  
ASEAN : Association of South East Asian Nations  
ATIGA : ASEAN Trade in Goods Agreement  
BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
BNSP : Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
CCS : Coordinating Committee on Services  
CEP : Comprehensive Economic Partnership  
CEPTF : Common Effective Preferential Tariff  
CLMV : Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam  
CPD : Continuing Professional Development  
CPL : Competition Policy and Law  
CV : Curriculum Vitae  
FAIP : Formulir Aplikasi Insinyur Profesional  
FDI : Foreign Direct Investment  
FTI : Fakultas Teknik Industri  
FTMD : Fakultas Teknik Mesin Dirgantara  
FTSL : Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan  
FTTM : Fakultas Teknik Pertambangan dan Teknik Perminyakan  
GEL : General Exception List  
HKI : Hak Kekayaan Intelektual  
HSL : High Sensitive List  
IPM : Insinyur Profesional Madya  
IPP : Insinyur Profesional Pratama

IPU : Insinyur Profesional Utama  
Kemendikti : Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
K3L : Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan  
ITB : Institut Teknologi Bandung  
LPJK : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi  
MEA : Masyarakat Ekonomi ASEAN  
MRA : Mutual Recognition Arrangement  
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak  
OVOP : One Village One Product  
RFPE :Registered Foreign Professional Engineer  
RPJMN :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
RPL : Recognisi Pembelajaran Lampau  
SIP : Sertifikasi Insinyur Profesi  
SAP SMED : Strategic Action Plan for ASEAN SME Development 2010 – 2015  
SKA : Sertifikat Keahlian  
SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  
SKS : Satuan Kredit Semester  
SL : Sensitive List  
SMEWG : ASEAN Small and Medium Enterprises Working Group  
STEI :Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
STRI : Surat Tanda Registrasi Insinyur  
PDB : Pendapatan Domestik Bruto  
PII : Persatuan Insinyur Indonesia  
PPPI : Program Pembinaan Profesi Insinyur  
PRA : Professional regulatory Authority  
PS – PPI : Program Studi Program Profesi Insinyur  
PT : Perseroan Terbatas  
PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
UU : Undang – Undang  
UNPAR : Universitas Katolik Parahyangan  
USTK : Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 8 Agustus 1997 Indonesia bersama dengan empat negara lainnya yaitu Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura membentuk *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). ASEAN merupakan bentuk perhimpunan kerjasama yang dilakukan oleh negara – negara di wilayah Asia Tenggara yang dilatar belakangi karena adanya unsur kesamaan yang dimiliki seperti keadaan alam, geografis, kebudayaan dan adanya persamaan nasib.<sup>1</sup> Persamaan yang dimiliki oleh negara – negara itu yang kemudian melahirkan rasa solidaritas sehingga mendorong lahirnya ASEAN.

Pembentukan ASEAN ini ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1997 yang di tanda tangani oleh menteri luar negeri dari masing – masing negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia yang di wakikan oleh Adam Malik, Malaysia yang di wakikan oleh Tun Abdul Rajak, Filipina yang di wakikan oleh Narsico Ramos, Thailand yang di wakikan oleh Thanant Koman dan Singapura yang di wakikan oleh S. Rajaratnam. Awalnya ASEAN memiliki 5 anggota kemudian negara – negara yang berada di Asia Tenggara ikut bergabung seperti Brunei pada tahun 1964, Vietnam

---

<sup>1</sup> *Sejarah Berdirinya ASEAN dan tujuannya*, Sejarah Indonesia, 2013, diakses dari <http://www.sejarah-negara.com/sejarah-berdirinya-asean-dan-tujuannya/>

pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999 sehingga saat ini ASEAN memiliki 10 negara anggota.<sup>2</sup>

ASEAN memiliki prinsip - prinsip utama yang harus dipatuhi oleh negara – negara anggota ASEAN yaitu harus saling menghormati, tidak ikut campur urusan negara lain, konsensus, dialog dan komunikasi. Didalam Deklarasi Bangkok dijelaskan bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu, memberikan bantuan dalam menyediakan sarana pelatihan dan penelitian, bekerjasama secara lebih efektif, mengajukan pengkajian tentang Asia Tenggara, dan menjaga kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dan regional.<sup>3</sup>

Masyarakat Ekonomi ASEAN dicetuskan pertama kali oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 1997 melalui KTT di Kuala Lumpur dengan menyepakati ASEAN Vision 2020. Kemudian pada tahun 2003 ASEAN mengadakan KTT di Bali yang melahirkan 3 pilar ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yaitu *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Political – Security Community*, dan *ASEAN Socio – Cultural Community*.<sup>4</sup> Pada tahun 2007 diadakan KTT ASEAN ke – 13, para pemimpin ASEAN berkumpul dan sepakat mempercepat pembentukan

---

<sup>2</sup> Rahman Asmardika, *8 Agustus 1967: ASEAN Dideklarasikan di Bangkok*, Okezone, 2015, diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/08/07/18/1192558/8-agustus-1967-asean-dideklarasikan-di-bangkok>

<sup>3</sup> Ratnaningsih Hidayati, *ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas*, Deepublish, 2015, hal 2 -3

<sup>4</sup> Gusmardi Bustami, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Departemen perdagangan Republik Indonesia, hal 4.



Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang awalnya akan diselenggarakan pada tahun 2020.<sup>5</sup> Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini dibentuk tidak lepas karena adanya faktor krisis yang terjadi pada tahun 1997 dan juga untuk meningkatkan daya saing negara – negara anggota ASEAN terhadap China dan India.<sup>6</sup> Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini dibentuk untuk mawadahi negara – negara anggota ASEAN agar dapat meningkatkan perekonomian negaranya dan juga dapat bersaing dengan dunia internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN dengan membentuk kawasan ekonomi yang kuat antar negara anggota dan menciptakan kawasan pasar bebas ASEAN sehingga dapat mengatasi permasalahan – permasalahan ekonomi yang terjadi di negara – negara anggota ASEAN.<sup>7</sup>

Masyarakat Ekonomi ASEAN juga memiliki komitmen untuk mewujudkan liberalisasi pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, adanya harmonisasi kebijakan, dan reformasi ekonomi.<sup>8</sup> Didalam Masyarakat Ekonomi ASEAN seluruh negara anggota ASEAN dituntut untuk melakukan liberalisasi perdagangan karena adanya arus bebas pada bidang barang, arus bebas pada bidang jasa, arus bebas pada bidang investasi, arus

---

<sup>5</sup> Ibid hal. 4.

<sup>6</sup> Ibid hal. 4.

<sup>7</sup> *Kabupaten Malang Menuju MEA 2015*, diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156432-%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20D768.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156432-%5B_Konten_%5D-Konten%20D768.pdf)

<sup>8</sup> Direktur Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, KEMENDAG, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Meningkatkan Daya Saing, Meraih Peluang*, KEMENDAG, 2015, diakses dari <http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/09/Indonesia-Services-Dialogue-Meningkatkan-Daya-Saing-Meraih-Peluang.pdf>

bebas pada bidang modal, dan arus bebas pada bidang tenaga kerja terampil.<sup>9</sup> Dengan adanya liberalisasi pasar tentu hal ini akan berdampak pada bebasnya aliran di bidang barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara anggota ASEAN.

Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 negara – negara anggota ASEAN harus mempersiapkan secara matang sehingga negara – negara anggota ASEAN dapat menjadikan era MEA 2015 ini sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini tentu dibutuhkan persiapan yang matang yang membutuhkan peran pemerintah dalam melakukan persiapan, melihat pemerintah memiliki andil yang besar dalam menentukan kesiapan suatu negara. Pemerintah dapat melakukan upaya yang mendukung sumber daya dalam negeri agar dapat bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Namun peran pemerintah dalam membuat kebijakan juga membutuhkan peran dari individu untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 negara – negara ASEAN akan menghadapi delapan persaingan terbuka yaitu pada bidang insinyur, arsitektur, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survey,

---

<sup>9</sup> *Kabupaten Malang Menuju MEA 2015*, diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156432-%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20D768.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156432-%5B_Konten_%5D-Konten%20D768.pdf), hal 5.

praktisi medis, dan perawat.<sup>10</sup> Dengan adanya MEA diprediksikan pada tahun 2015 akan membuka peluang untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja terdidik sebesar 14 juta atau naik 41 persen, sedangkan lowongan kerja keterampilan menengah tumbuh 22 persen atau sekitar 38 juta, dan pekerjaan dengan keterampilan rendah naik 24 persen atau naik 12 juta.<sup>11</sup> Hal ini dapat menjadi peluang bagi negara – negara anggota ASEAN namun disamping itu juga dapat menjadi ancaman jika dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini tidak ditanggapi dengan persiapan yang matang oleh negara – negara anggota ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga harus memiliki pembekalan sehingga dapat bersaing dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pemerintah Indonesia dan masyarakat harus berperan aktif dalam menghadapi era MEA. Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya dengan membuat kebijakan yang dapat mendukung masyarakat dan peran dari individu juga dibutuhkan agar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Saat ini Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur melalui kebijakan pemerintahan Jokowi, melihat infrastruktur merupakan salah satu pilar utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing suatu negara sehingga hal ini akan berkaitan langsung dengan terbukanya peluang

---

<sup>10</sup> Steffi Teowira, *8 Profesi yang akan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Rappler, 2015, diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/117439-8-profesi-masyarakat-ekonomi-asean-mea>.

<sup>11</sup> Ella Syaputri, *MEA tawarkan 14 juta lapangan kerja baru*, antaranews, 2014, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/450113/mea-tawarkan-14-juta-lapangan-kerja-baru>.

tenaga kerja di bidang insinyur. Kualitas infrastruktur Indonesia masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan negara – negara lain, Indonesia menempati peringkat ke - 61 dari 148 negara dan jika di bandingkan negara – negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia menempati peringkat ke 5.<sup>12</sup> Namun perlu diingat dengan adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 tentu akan membuka peluang bagi insinyur asing untuk dapat mengambil kesempatan kerja di Indonesia dan begitupun sebaliknya insinyur Indonesia dapat mengambil kesempatan bekerja di negara – negara anggota ASEAN lainnya. Pada akhirnya hal yang berpengaruh adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan insinyur Indonesia agar siap memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 negara – negara anggota ASEAN dituntut untuk mempersiapkan dalam menghadapi liberalisasi pasar terkait 8 profesi seperti insinyur, arsitektur, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survey, praktisi medis, dan perawat sehingga memudahkan pergerakan tenaga kerja asing untuk masuk ke negara – negara anggota ASEAN. Namun jika tidak dipersiapkan dengan baik negara – negara

---

<sup>12</sup> G.T Suroso, *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kementerian Keuangan, 2015, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20517-infrastruktur-dan-pembangunan-ekonomi>.

ASEAN tentu akan menghadapi permasalahan internal maupun eksternal dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Indonesia pun tentu akan menghadapi permasalahan internal maupun eksternal didalam era MEA 2015 jika tidak melakukan persiapan yang matang.

Jasa konstruksi memiliki kaitan dengan profesi insinyur. Indonesia memiliki peluang yang besar dibidang konstruksi karena memiliki pasar konstruksi terbesar di ASEAN.<sup>13</sup> Di bidang konstruksi, Indonesia menyumbang 67 % bagi pasar ASEAN, bahkan kota Jakarta merupakan kota tertinggi pertumbuhan konstruksinya jika dibandingkan dengan kota – kota yang ada di negara – negara anggota ASEAN.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan pasar yang berpotensi di ASEAN. Jasa konstruksi sendiri merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang salah satunya mencakup pekerjaan insinyur.<sup>15</sup> Didalam era MEA 2015 para insinyur negara anggota ASEAN memiliki kebebasan untuk bekerja di negara – negara ASEAN.

Profesi Insinyur memiliki peluang pekerjaan yang besar di Indonesia terkait dengan kebijakan Jokowi yang tercantum didalam RPJMN 2014 – 2019. Didalam kebijakan ini memfokuskan pada pembangunan infrastruktur

---

<sup>13</sup> *Kesiapan Konsultan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Pusat komunikasi Publik, 2015, diakses dari [http://pu.go.id/main/view\\_pdf/9829](http://pu.go.id/main/view_pdf/9829)

<sup>14</sup> *Peran Konsultan Indonesia Penting tuk Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2014, diakses dari <http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=930>

<sup>15</sup> M. Bahrin Nawawi, *Jasa Konstruksi, antara Pasal 4(2) dan Pasal 23 UU PPH*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2014, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19556-jasa-konstruksi,-antara-pasal-4-2-dan-pasal-23-uu-pph>

sehingga dapat membuka pasar dan peluang bagi tenaga kerja di bidang konstruksi khususnya insinyur. Didalam pemerintahan Jokowi memiliki target pembangunan yang ingin dicapai seperti pembangunan 2.650 KM jalan baru, pembangunan jalan tol sebesar 1.000 KM, pembangunan pelabuhan laut sebanyak 24, pembangunan pelabuhan udara sebanyak 15, dan pembangunan jalur kereta api sebesar 3.258 KM.<sup>16</sup> Proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 ini tentu akan menyerap banyak tenaga kerja di bidang insinyur. Sedangkan Indonesia hanya memiliki sedikit jumlah insinyur jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan jika dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya Indonesia masih kalah. Jika di Indonesia, jumlah insinyur per satu juta penduduk hanya sebanyak 3.038 orang sedangkan di Singapura mencapai 28.235.<sup>17</sup> Faktor seperti kurangnya minat mahasiswa di Indonesia juga terlihat yang berdampak pada sedikitnya pertumbuhan jumlah insinyur di Indonesia hanya sebesar 15% yang memilih bidang insinyur, berbeda dengan negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki jumlah yang lebih besar yaitu Malaysia 24 % dan Vietnam 25%.<sup>18</sup> Padahal di Indonesia sendiri jika dilihat dari kebijakan Jokowi yang mengutamakan pembangunan akan membutuhkan

---

<sup>16</sup>Direktur Program KPPIP, *Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016, diakses dari <file:///Users/tifannyclara/Downloads/20160126-undip-presentation-framework-pembangunan-infrastruktur-indonesia-final.pdf>

<sup>17</sup> Pusat Komunikasi Publik, *Dibanding Jumlah Penduduk, Insinyur Tersertifikasi ACPE di Indonesia Masih Kurang*, 2015, hal 2, diakses dari <https://www.pu.go.id/m/main/view/10032>

<sup>18</sup> Novita Intan Sari, *PII: Minat Anak Muda Indonesia Jadi Insinyur Turun*, 2015, diakses dari <http://www.merdeka.com/uang/pii-minat-anak-muda-indonesia-jadi-insinyur-turun.html>

penambahan jumlah sekitar 120.000 tenaga kerja insinyur pertahunnya.<sup>19</sup> Keterbatasan SDM di bidang insinyur tentu akan menjadi permasalahan internal bagi Indonesia karena tidak dapat memenuhi permintaan akan tenaga kerja insinyur yang dibutuhkan. Perlu diingat didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini aliran Insinyur asing dapat bergerak bebas memasuki Indonesia sehingga insinyur asing dapat mengambil pekerjaan di Indonesia dan dapat menimbulkan permasalahan internal di Indonesia seperti hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Indonesia bukan hanya akan menghadapi permasalahan internal tapi juga akan menghadapi permasalahan eksternal karena harus bersaing dengan para insinyur dari negara anggota ASEAN lainnya. Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 akan terdapat aliran bebas pada tenaga kerja terampil yang salah satunya adalah insinyur. Pergerakan tenaga kerja terampil di bidang profesi insinyur diatur didalam *Mutual Recognition Arrangement on Engineering* yang telah disetujui oleh menteri ekonomi ASEAN mengenai pelatihan termasuk kualifikasi profesi yang diperoleh oleh negara asal dengan melakukan sertifikasi pelatihan ataupun kualifikasi melalui pengakuan dalam bentuk sertifikat sehingga dapat menjadi Insinyur Profesional. Didalam MRA di bidang insinyur diatur mengenai pergerakan insinyur di negara – negara anggota ASEAN sehingga bagi insinyur yang mau bekerja di negara –

---

<sup>19</sup> Humas, *Sudah Punya 700 ribu, Indonesia Masih Butuh 120 ribu*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015, diakses dari <http://setkab.go.id/sudah-punya-700-ribu-indonesia-masih-butuh-120-ribu-insinyur/>.

negara anggota ASEAN harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan didalam MRA di bidang insinyur. Insinyur yang berasal dari negara – negara anggota ASEAN harus memiliki gelar ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) sehingga dapat bekerja di negara – negara anggota ASEAN yang ingin dituju. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk mendorong para insinyur di Indonesia sehingga memiliki gelar ACPE sehingga dapat bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Penetapan menjadi insinyur profesional menurut MRA harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga para insinyur dapat bergerak bebas memasuki negara – negara anggota ASEAN. Saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah insinyur terbesar yang terdaftar sebagai ACPE jika dibandingkan dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya. Namun hal ini tidak dapat dijadikan keunggulan bagi Indonesia karena belum memenuhi standar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 630 orang yang terdaftar sebagai ACPE, Malaysia sebanyak 245 orang, Vietnam 164 orang, Filipina 130 orang, Thailand 89 orang, Kamboja 30 orang, Laos 3 orang, dan yang paling sedikit Brunei Darussalam hanya memiliki 2 orang yang terdaftar sebagai ACPE.<sup>20</sup> Jika jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah ACPE Indonesia masih belum proporsional. Rasio jumlah ACPE di Indonesia jika dibandingkan dengan per 1 juta penduduk hanya mencapai 2,52 sedangkan Singapura rasionya mencapai 44,01, Malaysia mencapai 8,09, Brunei darussalam mencapai 4,69,

---

<sup>20</sup> Rudiyanto Handoyo (Direktur Eksekutif PII), pada tanggal 16 November 2016, pukul 10.15-11.05 WIB



Myanmar mencapai 2,97, Kamboja mencapai 2,10, Vietnam mencapai 1,79, Filipina mencapai 1,30, Thailand mencapai 1,28, dan Laos mencapai 0,48.<sup>21</sup> Sedangkan menurut AFEO, jumlah insinyur profesional di Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memiliki jumlah insinyur profesional sekitar 9000 orang, sedangkan Malaysia 11.170 orang, Thailand 23.000 orang dan Filipina 14.250.<sup>22</sup> Didalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dibutuhkan insinyur profesional yang memiliki gelar ACPE sesuai yang tercantum dalam MRA agar dapat bersaing dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

“Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempersiapkan Profesi Insinyur Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?”

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan diambil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini mengambil tahun 2014 karena ditahun 2014 terjadi pergantian pemerintahan dari pemerintahan SBY kepada pemerintahan Joko Widodo. Didalam pidato rangka HUT RI ke – 71, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Indonesia harus ikut berlomba dengan menjadi ‘pemain’ dan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan PII

<sup>22</sup> Iwan Suyudhie Amri, *Masyarakat ASEAN*, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2015, hal 7, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%207%202015.pdf>

bukan hanya menjadi ‘penonton’.<sup>23</sup> Hal ini membuat seluruh kebijakan dan program kerja diarahkan untuk mempersiapkan partisipasi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pada tahun 2016 diambil karena pada tahun 2016 telah dijalankan beberapa kebijakan dan program kerja terkait dengan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan profesi insinyur dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Upaya pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan profesi Insinyur di Indonesia menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

#### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki kegunaan untuk kepentingan praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi lain untuk melakukan penelitian yang topiknya berkaitan dengan topik penelitian ini. Disamping itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pun membantu bagi cabang-cabang ilmu lainnya yang membutuhkan.

---

<sup>23</sup> Anselmus Bata, “*Ini Pidato Jokowi pada Peringatan HUT RI ke – 71 RI di Sidang DPR dan DPD*”, diakses dari <http://www.beritasatu.com/politik/380026-ini-pidato-jokowi-pada-peringatan-hut-ke71-ri-di-sidang-dpr-dan-dpd.html>

#### 1.4 Literature Review

Didalam jurnal yang berjudul “Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” yang ditulis oleh M. Ari Salbilah Rahman hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia belum siap dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.<sup>24</sup> Kedua adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 sangat diperlukan yang menyangkut sisi pendidikan, produktivitas, tenaga kerja, dan upah.<sup>25</sup> Pendidikan yang mendorong pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang utamanya menekankan pada *skill, attitude*, dan *knowledge*. Sedangkan produktivitas dapat dilakukan dengan mempercepat sertifikasi internasional dalam bidang – bidang tertentu dan peningkatan upah, upah memiliki korelatif dengan produktivitas maka mempercepat tenaga kerja terampil yaitu dengan memperbesar lulusan SMK sehingga memiliki sertifikasi kompetensi dan diakui ditingkat internasional.

Didalam hasil penelitian yang dilakukan oleh ASEAN Study Centre UI bekerjasama dengan Kemenlu RI yang berjudul “Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN” yang difokuskan pada bagian jasa keinsinyuran menjelaskan mengenai jasa keinsinyuran yang mencakup gambaran umum jasa keinsinyuran juga MRA yang mengatur jasa keinsinyuran, permasalahan insinyur Indonesia baik secara kuantitas

---

<sup>24</sup> M. Ari Salsabilah Rahman, “*Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*”, diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20\(04-27-15-03-10-08\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20(04-27-15-03-10-08).pdf)

<sup>25</sup> Ibid

maupun kualitas, kebijakan pemerintah dalam bidang keinsinyuran, dan juga rekomendasi yang diberikan. Dengan adanya penjelasan mengenai permasalahan insinyur secara kualitas maupun kualitas yang dihadapi Indonesia tentu akan membantu peneliti untuk menjelaskan upaya – upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam memenuhi ketentuan MRA yang ditetapkan.<sup>26</sup>

Didalam buku “Kesiapan Jasa Sektor Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” yang difokuskan pada Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sektor Jasa Konstruksi Nasional, dijelaskan mengenai upaya – upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat peraturan domestik untuk meningkatkan kinerja jasa konstruksi nasional dan juga mengenai rencana pembangunan pada tahun 2015 – 2019.<sup>27</sup> Untuk itu hal ini relevan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat upaya – upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya di bidang jasa keinsinyuran.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menggambarkan upaya yang dilakukan dibutuhkan kerangka teoritis yang berisi teori serta konsep dari beberapa ahli sehingga penelitian

---

<sup>26</sup>Makmur Keliat, Ph.D Asra Virgianita, MA Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D Agus Catur Aryanto Putro, S.Sos, *Pemetaan pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN*, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013, hal 25 – 33, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Documents/Penelitian%20BPPK%202014/Laporan%20Akhir%20Liberalisasi%20Jasa.pdf>

<sup>27</sup>*Kesiapan Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Kementerian Perdagangan, 2015, hal 17 – 19, diakses dari <http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177237/buku-konstruksi-oktober-2015.pdf>

yang disampaikan menjadi komprehensif dan relevan dengan hubungan internasional. Adanya teori dapat membantu penulis untuk menjelaskan data – data yang telah diperoleh. Teori merupakan alat yang penting dalam proses pengumpulan data hingga dalam proses menjelaskan.

Teori pluralisme memiliki empat kata kunci yang dianggap paling utama.<sup>28</sup> Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, empat kunci utama tersebut ialah yang pertama, pluralisme menganggap bahwa terdapat aktor selain negara, seperti salah satunya adalah organisasi internasional yang merupakan aktor terpenting dalam ranah politik internasional. Aktor non-negara dapat dianggap penting karena memiliki peran dalam proses implementasi, pengawasan, dan juga penghakiman berkaitan dengan segala keputusan yang diambil oleh suatu negara. Teori ini menganggap bahwa aktor selain negara memiliki pengaruh besar dalam segala keputusan yang akan diambil suatu negara dalam mencapai kepentingan negara tersebut dengan cara-caranya sendiri yang tentu berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintahan. Kedua, pluralisme menganggap bahwa negara bukanlah satu – satunya aktor karena terdapat aktor-aktor lain selain negara yang juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara sehingga menjadikan negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Dalam mengambil suatu keputusan suatu negara didapat berdasarkan hasil diskusi bersama dengan aktor non-pemerintah, perusahaan asing, atau bahkan

---

<sup>28</sup>Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism 2nd edition* (Columbia,1993), hal. 228-229.

opini masyarakat umum. Ketiga, pluralisme menentang anggapan bahwa negara selalu bertindak rasional. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara. Aktor selain negara dapat bertindak baik dengan negara atau tidak untuk menjalankan tugasnya yaitu memperbaiki apa yang negara belum bisa lakukan. Seperti misalnya adanya konflik atau perselisihan dalam penerapan kebijakan negara. Disini aktor non negara dapat bertindak untuk menjembatani dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Yang keempat, pluralisme menganggap bahwa isu-isu politik juga bisa dikaitkan dengan isu ekonomi, sosial, ekologi dan lainnya yang berhubungan dengan pertumbuhan suatu negara. Pluralisme sering menganggap bahwa isu sosial lebih penting daripada isu militer.

Penulis berusaha mengkaji penelitian ini melalui paradigma pluralisme yaitu dalam politik internasional negara yaitu Indonesia bukan merupakan satu – satunya aktor, namun ada aktor lain seperti non negara yaitu ASEAN yang mempengaruhi negara dalam mengambil sebuah kebijakan.

Liberalisme merupakan salah satu teori besar yang digunakan dalam ilmu hubungan Internasional. Banyak ahli yang mendefinisikan paham liberalisme. Salah satunya dimulai dari pada abad ke 17 John Locke yang melihat adanya kemampuan yang besar pada kemajuan manusia di masyarakat sipil modern dan ekonomi kapitalis.<sup>29</sup> Dalam pemahaman liberalisme juga memiliki pandangan yang optimis tentang sifat manusia hal ini tentu berbeda dengan

---

<sup>29</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction International Relations Theories & Approaches*, Oxford, 2010, hal 97.

pandangan realisme yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang memiliki pandangan pesimis terhadap sifat manusia. Liberalisme meyakini bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional sehingga mengutamakan kebebasan individu diatas segalanya juga optimis terhadap sifat manusia yang positif sehingga dapat melakukan kerjasama dengan membentuk organisasi internasional untuk keuntungan semua pihak. Paham Liberalisme juga memiliki pandangan bahwa negara hanya bertugas untuk membuat dan menetapkan aturan hukum yang dapat menjamin hak – hak warga negara untuk hidup dan memberikan masyarakat kebebasan sehingga campur tangan negara dapat diminimalisir.<sup>30</sup>

Didalam paham liberalisme dibagi lagi menjadi 4 yaitu sosiologis liberalisme, interdependensi liberalisme, institusional liberalisme, dan republik liberalisme.<sup>31</sup> Didalam Liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson mempercayai dengan adanya organisasi internasional dapat menimbulkan dampak yang baik didalam hubungan internasional karena dapat mengatur tindakan negara. Woodrow Wilson menganalogikan Hubungan Internasional sebagai sebuah “hutan” yang kemudian berubah menjadi “kebun binatang”, Hutan yang digambarkan sebagai kekuasaan politik yang kacau kemudian ketika mengalami perubahan ke kebun binatang menjadi memiliki aturan dan kedamaian. Untuk itu organisasi internasional dinilai akan mewedahi negara – negara dalam melakukan kerjasama sehingga

---

<sup>30</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction International Relations Theories & Approaches*, Oxford, 2010, hal 96 - 98.

<sup>31</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction International Relations Theories & Approaches*, Oxford, 2010, hal 96-113.

dapat menciptakan kedamaian.<sup>32</sup> Teori institusional liberalisme dapat digunakan untuk melihat organisasi internasional yaitu ASEAN karena dengan adanya ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional dapat mengatur negara – negara yang menjadi anggota dari ASEAN sehingga dapat menciptakan kedamaian diantara negara – negara anggota.

Didalam integrasi ekonomi yang dikemukakan oleh Bela Balassa terdapat lima tahapan, yaitu yang pertama *Free Trade Area*, yang kedua *Customs Union*, yang ketiga *Common Market*, yang keempat *Economic Union*, dan yang kelima *Complete Economic Integration*.<sup>33</sup>

1. *Free Trade Area*, didalam tahapan *free trade area* terdapat penghapusan tarif dan kuota diantara negara – negara sesama anggota, sedangkan masing – masing negara anggota dapat menerapkan tarif yang diinginkan kepada negara bukan anggota.
2. *Customs Union*, didalam tahapan *custom union*, hambatan pergerakan barang diantara negara – negara anggota telah dihapuskan dan juga telah menerapkan tarif yang sama dengan negara bukan anggota.
3. *Common Market*, didalam tahapan *Common Market* bukan hanya hambatan perdagangan yang telah dihapuskan namun negara anggota juga telah menghapuskan hambatan dalam pergerakan faktor produksi dari negara anggota ke negara anggota lainnya seperti pada barang, jasa, dan modal.

---

<sup>32</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction International Relations Theories & Approaches*, Oxford, 2010, hal.105 – 109.

<sup>33</sup>Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, Oxon, 2011. Hal. 174-175



4. *Economic Union*, didalam tahapan *economic union* terdapat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional diantara negara – negara anggota.
5. *Complete Economic Integration*, didalam tahapan *complete economic Integration* kekuasaan negara berada dibawah badan supranational yang telah dibentuk dengan ditandai adanya penyatuan kebijakan moneter, fiskal, sosial yang mengikat seluruh negara yang menjadi anggota, sehingga negara anggota harus mematuhi kebijakan yang telah dibuat.<sup>34</sup>

Dengan adanya teori integrasi ekonomi yang dikemukakan oleh Bela Balassa dapat membantu untuk menjelaskan posisi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 didalam pergerakan jasa yaitu di bidang profesi insinyur yang berada di tahapan *common market*, karena di tahapan *common market* negara – negara anggota telah menghapuskan hambatan pada faktor produksi seperti jasa sehingga didalam tahapan inilah terdapat pergerakan dari profesi insinyur diantara negara – negara anggota ASEAN.

MRA ( *Mutual Recognition Arrangement* ) adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat untuk mengatur liberalisasi pasar dengan menetapkan suatu kualifikasi yang disepakati oleh anggota – anggota ASEAN.<sup>35</sup> Profesi bidang insinyur diatur didalam *MRA on Engineering*. Didalam *MRA on Engineering* diatur mengenai *Professional Engineer* (PE), *Registered Foreign Professional Engineer* (RFPE), dan *Professional Regulatory Authority* (PRA).

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Sufian Jusoh, Pierre Sauve, Yahaya Ramli, dan Shamsul Izhan Abdul Majid, “*Handbook on Liberalisation of Professional Services Through Mutual Recognition in ASEAN : Engineering Services*”, The Asean Secretariat, 2015, hal. 13.

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 negara – negara anggota ASEAN harus mempersiapkan diri salah satunya dengan membuat kebijakan. Beberapa ahli mengemukakan definisi mengenai kebijakan publik seperti James E. Anderson yang mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor yang memiliki tujuan dalam mengatasi permasalahan ataupun persoalan.<sup>36</sup> Clarke E. Cochran mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan sengaja yang diikuti oleh badan – badan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan isu – isu publik.<sup>37</sup> Sedangkan Thomas E. Dye mendefinisikan kebijakan sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan.<sup>38</sup> Untuk itu dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini dibutuhkan kebijakan yang mendukung suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya.

Jasa keinsinyuran adalah jasa yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, dan teknologi di suatu negara.<sup>39</sup> Bidang Keinsinyuran ini merupakan fokus utama yang akan diteliti dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang insinyur.

---

<sup>36</sup> Marc Allen Eisner, Jeff Worsham, dan Evan J Ringquist. “*Contemporary Regulatory Policy*”. Lynne Rienner Publisher:2009. Hal 4.

<sup>37</sup> Ibid hal. 4.

<sup>38</sup> Ibid hal. 4.

<sup>39</sup> Sufian Jusoh, Pierre Sauve, Yahaya Ramli, dan Shamsul Izhan Abdul Majid, “*Handbook on Liberalisation of Professional Services Through Mutual Recognition in ASEAN : Engineering Services*”, The Asean Secretariat, 2015, hal. 25 – 33.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud tertentu, atau usaha untuk memecahkan persoalan maupun mencari jalan keluar.<sup>40</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sertifikasi adalah proses penyertifikatan.<sup>41</sup>

Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi setelah mendapatkan gelar sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran.<sup>42</sup>

Sertifikat kompetensi insinyur adalah dokumen kemampuan dalam menjalankan praktik profesi insinyur yang didapatkan setelah mengikuti program profesi insinyur dan dinyatakan lulus.<sup>43</sup>

Menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2014 Insinyur adalah seseorang yang memiliki gelar profesi di bidang keinsinyuran.<sup>44</sup>

Uji Kompetensi menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 adalah penilaian kompetensi keinsinyuran yang dilakukan secara terukur dan menilai secara objektif capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi insinyur.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/upaya>

<sup>41</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/sertifikasi>

<sup>42</sup> “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Program Profesi Insinyur”, diakses dari <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/PERMEN-NOMOR-35-TAHUN-2016-TENTANG-PROGRAM-PROFESI-INSINYUR-FINAL-SALINAN.pdf>

<sup>43</sup> “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Program Profesi Insinyur”, diakses dari <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/PERMEN-NOMOR-35-TAHUN-2016-TENTANG-PROGRAM-PROFESI-INSINYUR-FINAL-SALINAN.pdf>

<sup>44</sup> “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran”, diakses dari <http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU11-2014Keinsinyuran.pdf>

<sup>45</sup> “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran”, diakses dari <http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU11-2014Keinsinyuran.pdf>

Kode etik adalah norma atau landasan yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.<sup>46</sup>

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan narasi ataupun deskripsi secara tekstual dari fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan menggambarkan perilaku pada kelompok tertentu.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu deskriptif dan tipe penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan kajian literatur yang dikumpulkan dari buku, koran, dan media elektronik lainnya, seperti berita, jurnal dan juga wawancara.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut. Pada Bab 1 akan disusun mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan

---

<sup>46</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/kode>

sistematika pembahasan. Pada Bab 2 akan dijelaskan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang diatur didalam Mutual Recognition Arrangements. Pada Bab 3 akan dijelaskan mengenai kondisi insinyur di Indonesia dan ASEAN, dan juga upaya yang dilakukan pemerintah. Bab 4 akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi dari penulis.